

# RIEFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (SIMTLHP) DI INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RIBKA PRISKILA

NPP. 30.0934

*Asdaf Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: ribkapriskila001@gmail.com

## ABSTRACT (in english)

**Problem Statement/Background (GAP):** The implementation of budget management has not been carried out according to ideal accounting procedures, on the other hand it shows that the guidance and internal control carried out by the Regional Inspectorate of Katingan Regency, Central Kalimantan Province has also not been optimal. The problems that stand out internally and also influence the performance of the Inspectorate's oversight function are related to the supervisory abilities possessed by Inspectorate employees who are still not optimal. **Purpose:** The purpose of this study was to find out, analyze and describe the effectiveness of the use of the Management Information System Follow-Up Examination Results (SIMTLHP) at the Inspectorate of Katingan Regency, Central Kalimantan Province, the inhibiting factors and efforts to overcome and optimize them. **Method:** This study used a qualitative research design with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. In this study, the informants were determined through purposive and snowball sampling techniques. The data analysis technique is carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the research were analyzed using the theory of Effectiveness according to Duncan in Steers (1985) which consists of 3 (three) dimensions, namely goal attainment, adaptation and indicators which show that the Management Information System Follow-Up of Examination Results is very effective and efficient in terms of indicators designed to achieve indicators namely Target Achievement, Adaptation, and Integration. The Katingan Regency Inspectorate has carried out the use of SIMLHTP properly but has not run optimally because there are several obstacles including budget constraints/technical guidance costs and the availability of human resources. **Conclusion:** the implementation of the Management Information System Follow-up on Examination Results was very effective and efficient in terms of indicators designed to achieve indicators namely Target Achievement, Adaptation, and Integration, but several obstacles still remained. In order to overcome the obstacles experienced, it is suggested that the Regional Inspectorate of Katingan Regency increase the number of human resources, especially in the field of Management Information System Admin Follow-Up of Examination Results who are competent in the field of Information Technology and also renew training resources for Inspectorate staff and promote them through social media.

**Keywords: Government Administration, Effectiveness, Management Information System Follow-Up of Examination Results**

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pelaksanaan pengelolaan anggaran belum berjalan sesuai prosedur akuntansi yang ideal, disisi lain menunjukkan bahwa pembinaan dan pengendalian internal yang di lakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah juga belum optimal. Permasalahan yang menonjol di dalam Internal dan turut mempengaruhi kinerja dari fungsi pengawasan Inspektorat adalah terkait kemampuan pengawasan yang dimiliki oleh para pegawai Inspektorat masih belum maksimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui,

menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) di Inspektorat Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi dan mengoptimalkannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan indikator yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Ujian sangat efektif dan efisien dalam hal indikator yang dirancang untuk mencapai indikator yaitu Pencapaian Sasaran, Adaptasi, dan Integrasi. Inspektorat Kabupaten Katingan sudah melaksanakan penggunaan SIMLHTP dengan baik namun belum berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa hambatan meliputi kendala anggaran/biaya bimbingan teknis dan ketersediaan sumber daya manusia. **Kesimpulan:** implementasi Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Ujian sangat efektif dan efisien dalam hal indikator yang dirancang untuk mencapai indikator yaitu Pencapaian Sasaran, Adaptasi, dan Integrasi, namun masih tetap ditemukan beberapa hambatan. Guna mengatasi hambatan yang dialami disarankan agar Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan melakukan penambahan jumlah sumber daya manusia khususnya pada bidang Admin Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang berkompeten pada bidang Teknologi Informasi dan juga memperbaharui sumber daya pelatihan untuk staf Inspektorat dan mempromosikannya melalui media sosial.

**Kata kunci: Administrasi Pemerintahan, Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, keduanya dapat membantu meningkatkan kinerja pengawasan daerah. Peraturan Daerah ini menetapkan Inspektorat, suatu lembaga pengawas internal daerah yang terdiri dari wakil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan yang bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Untuk laporan keuangan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang masih banyak ditemukan temuan, seperti: pencarian dan administrasi yang tidak tertib, uang persediaan, pemungutan, pelaporan pajak kendaraan bermotor tidak mencukupi, penyajian laporan modal tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan aset dan seterusnya. Sebagai akibat dari hambatan ini, mungkin sulit bagi semua pihak yang terlibat dalam audit untuk memperoleh dan memantau informasi yang akurat dan terkini tentang prosedur audit, temuan, langkah selanjutnya, dan pemantauan pengendalian internal yang berkelanjutan.

Mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sejumlah besar informasi akan menjadi lebih sederhana dan lebih cepat sebagai hasil dari adopsi teknologi informasi yang berkembang pesat secara luas. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* pemerintah.

Untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan yang berorientasi IT dan memperoleh akses yang lebih cepat dan akurat, diperlukan sistem aplikasi pengawasan yang dapat

mempertanggungjawabkan keadaan tersebut. Sehingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan akan meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Lanjutan Hasil Ujian baru secara online pada tahun 2021.

Pengawasan Inspektorat melalui Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara online diharapkan mendukung kinerja inspektorat secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Audit Online, yang juga digunakan untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan memantau pelaksanaan temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan bantuan database ini, kami dapat melakukan pemeriksaan secara tepat waktu, menyeluruh, dan teratur.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) di Inspektorat Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021, dari total jumlah pegawai sebanyak 44 hanya sebagian kecil yang memiliki kualifikasi sebagai Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD). Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan tugas pengawasan terhadap seluruh kegiatan/proyek dari seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Daerah. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kualifikasi Pendidikan Pegawai Inspektorat**  
**Daerah Kabupaten Katingan**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PNS
1	Strata 2	9
2	Strata 1	30
3	Diploma III	2
4	SLTA/ SEDERAJAT	3
<b>JUMLAH</b>		<b>44</b>

Sumber: Kepala sub. Bagian Administasi dan Umum

Hal ini tentu berpengaruh, baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap fungsi pengendalian dan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Kurang Maksimalnya fungsi kinerja dari pengawasan yang di lakukan oleh Inspektorat Daerah juga ditandai dengan belum dimilikinya standarisasi baku dalam proses pengawasan dan pembinaan pertanggungjawaban laporan keuangan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Provinsi. Tidak adanya standarisasi ini menimbulkan celah dan menjadi hambatan dalam proses pembinaan dan pengendalian internal oleh Inspektorat di Daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran belum berjalan sesuai prosedur akuntansi yang ideal, disisi lain menunjukkan bahwa pembinaan dan pengendalian internal yang di lakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah juga belumlah optimal. Permasalahan yang menonjol di dalam Internal dan turut mempengaruhi kinerja dari fungsi pengawasan Inspektorat adalah terkait kemampuan pengawasan yang dimiliki oleh para pegawai Inspektorat masih belum maksimal.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Tanti Susanti yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Simwas) (Studi Kasus Di Inspektorat Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)), menjelaskan bahwa tampilan dan format aplikasi SIMWAS, sebagian besar telah sesuai dengan kebutuhan prosedur audit kinerja, sedangkan keluaran

SIMWAS saat ini tidak memenuhi semua persyaratan yang dimaksudkan untuk dipenuhi dengan pelaksanaan (SIMWAS).

Penelitian dari Dilson yang berjudul Sistem Informasi Pengawasan Internal Inspektorat Berbasis Client Server menjelaskan bahwa Operator sistem data ini, yang meliputi Bagian Keuangan, Administrasi, dan Inspektur, berbicara tentang hasil tindak lanjut kasus khusus (biasa).

Penelitian dari Astri Furqani, dkk yang berjudul Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sumenep) menjelaskan bahwa Kesiapan SDM untuk penerapan TI dalam pengawasan sudah cukup memadai, terutama di kalangan auditor. Kemungkinan ada kesulitan pada awal pelaksanaan, namun dengan sosialisasi dan pelatihan terus menerus, kesulitan tersebut akan dapat diatasi. Sedangkan Kesiapan infrastruktur untuk penerapan TI dalam pengawasan belum sepenuhnya memadai. Infrastruktur yang memadai yaitu jumlah komputer dan ketersediaan jaringan internet yang baik. Hal yang masih belum memadai yaitu terkait jaringan LAN dan keamanan data, namun kedua hal tersebut dapat segera teratasi karena bukan merupakan hal yang sulit.

Penelitian dari Januar Briand Saiyang, dkk yang berjudul Analisis Kinerja Pegawai Di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Setelah Penerapan Sistem Elektronik Kinerja (e-KIN) menjelaskan bahwa Implementasi e-Kinerja pegawai Inspektorat Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dari penerapan e-kinerja itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan, kinerja dan kesejahteraan PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Masih terdapat catatan-catatan yang harus menjadi perhatian terutama masalah kedisiplinan dan perilaku pegawai demi peningkatan kinerja pegawai dan peningkatan performa sistem e-kinerja itu sendiri. Perilaku positif (positive behavior) sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan begitu juga halnya dengan keberhasilan kebijakan penerapan e-kinerja oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi utara. PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri untuk mensukseskan pencapaian tujuan dari e-Kinerja.

Penelitian dari Sartika Fitra Ayu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pemeriksaan Penggunaan Dana Desa Pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan bahwa dengan sistem yang terkomputerisasi ini akan memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa dikarenakan laporan penggunaan dana hanya dilaporkan oleh operator desa pada aplikasi tersebut dan dapat dilakukan pengecekan secara berkala pada laporan penggunaan dana desa. Selain itu juga mempercepat kinerja pegawai dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan penggunaan dana desa dikarenakan data laporan secara keseluruhan sudah ada pada sistem.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Tanti Susanti yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Simwas) (Studi Kasus Di Inspektorat Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn) membahas terkait analisis implementasi Simwas, berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Inspektorat Kabupaten Katingan untuk Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP).

Penelitian yang dilakukan oleh Dilson yang berjudul Sistem Informasi Pengawasan Internal Inspektorat Berbasis Client Server membahas terkait Inspektorat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi subjek penelitian ini, yang mengkaji inner working dari prosedur penjaminan mutu Kementerian.

Penelitian yang dilakukan oleh Astri Furqani, dkk yang berjudul Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sumenep) lebih fokus membahas terkait kesiapan Inspektorat dalam

penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Januar Briand Saiyang, dkk yang berjudul Analisis Kinerja Pegawai Di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Setelah Penerapan Sistem Elektronik Kinerja (e-KIN) membahas terkait sumber daya manusianya yaitu analisis kinerja pegawai Inspektorat Daerah setelah diterapkannya sistem elektronik kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika Fittra Ayu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pemeriksaan Penggunaan Dana Desa Pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, dimana dalam jurnal ini topik pembahasannya merupakan jenis perancangan sistem informasi berbasis elektronik yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan penggunaan dana desa oleh Inspektorat Daerah

### **1.5. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) Di Inspektorat Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasinya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:7) bahwa metode penelitian kualitatif yang berpijak pada filosofi postpositivisme sering disebut sebagai metode baru atau postpositivistik.

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Amiruddin (2016: 98) mendefinisikan mengenai metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan atas fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang implemmentasi kebijakan pembatasan timbulan sampah sekali pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori efektivitas yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berkaitan dengan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) Di Inspektorat Kabupaten Katingan maka peneliti melakukan observasi secara langsung melalui penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2023 untuk melihat sejauhmana hasil yang dicapai, apakah sudah memenuhi target atau belum. Menurut sudut pandang peneliti dan berdasarkan uraian teori-teori diatas, peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 1985) yang tepat dipakai untuk penelitian ini.

### 3.1 Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) Di Inspektorat Kabupaten Katingan


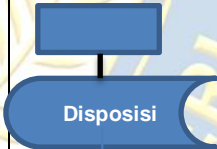

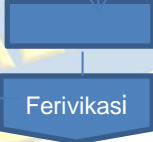

#### 3.1.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sebagai peristiwa tunggal. Ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yaitu: Berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur, Langkah Inspektorat Setelah Melakukan Audit dan Pencapaian Keberhasilan dalam pelaksanaan SIMTLHP. Pada dimensi pencapaian tujuan ini terdapat 3 (tiga) indikator yang akan dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) di Inspektorat Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

##### a. Berjalan Sesuai Standar Operasional Prosedur

Prosedur Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) Di Inspektorat Kabupaten Katingan terdapat pada Manual Book yang diberikan oleh Kasubbag Administrasi Umum Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Katingan. Dalam buku manual ini akan dijelaskan tata cara penginputan temuan, pemantauan tindak lanjut, penyelesaian temuan dan penyimpanan bukti-bukti yang dapat dilihat secara keseluruhan maupun per SKPD.

##### b. Langkah Inspektorat Setelah Melakukan Audit

No	URAIAN KEGIATAN	Operator SKPD	Administrator/ Admin Inspektorat	Penanggung Jawab Sekretariat Bag.Evlap	Pengarah (Inspektur)	Pembina (Sekda)	Bupati
1	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Kab/Provinsi						
2	Memberikan Disposisi Penginputan Laporan Hasil Pemeriksaan						
3	Melakukan penginputan dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspektorat Kab/Prov, BPKP,BPK-RI)						
4	Ferivikasi hasil penginputan kedalam aplikasi						
5	Memberikan Hak Akses ke Operator : - Memberikan ID Paswor/ User ID ke Operator						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompilasi Data yang masuk ke server</li> </ul>						
6	<p>Upload Data ke Aplikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mereview ulang bukti dokumen tindak lanjut STS, surat, dokumen pendukung</li> <li>- Mengupload data ke aplikasi SIM-TLHP</li> </ul>						
7	<p>Memeriksa kebenaran data upload :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferivikasi data</li> <li>- Meminta Hard Copy Dokumen yang diupload</li> <li>- Konsultasi ke Pimpinan/ pihak yang berwenang memberikan persetujuan penghapusan</li> <li>- Mengubah Status Tindak Lanjut</li> </ul>						
8	<p>Membuat laporan Progres Hasil Tindak Lanjut temuan pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi untuk operator</li> <li>- Pelaporan secara berjenjang</li> </ul>						

### **c. Pencapaian Keberhasilan Dalam Pelaksanaan**

Pencapaian Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) Di Inspektorat Kabupaten Katingan adalah suatu proses dalam menentukan akhir tujuan bersama yang dimana sebelum mencapai tujuan akhir harus melalui serangkaian proses yang harus dilalui. Membuat kebijakan dan berjalan dengan lancar sangat penting untuk mengukur kemanjurannya. Keberhasilan program Pemerintah SIMTLHP (Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Untuk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) di Inspektorat Kabupaten Katingan dapat diukur antara lain dengan pencapaian tersebut.

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) Di Inspektorat Kabupaten Katingan berdampak positif terhadap kelancaran terhadap proses administrasi dan membantu tugas pengawasan Inspektorat tersebut.

Selain itu, aplikasi ini dapat membantu Inspektorat untuk mendokumentasikan seluruh bukti secara digital. Dengan begitu akan mengurangi kemungkinan kehilangan dokumen, dan membantu pengelolaan fisik bukti dokumen.

### **3.1.2 Adaptasi**

#### **a. Hubungan Kerja Antar SKPD**

Prinsip gotong royong dan dukungan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkesinambungan tertanam dalam pola hubungan kerja antar perangkat daerah.

#### **b. Bersifat Menghemat atau Ekonomis**

Penggunaan waktu, jarak dan tenaga secara efektif dan efisien akan berpengaruh pada tercapainya suatu efektivitas dan tujuan yang di harapkan. Adanya Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan akan lebih menghemat baik dari segi waktu, jarak dan tenaga.

### **3.1.3 Integrasi**

#### **a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program**

Segala sesuatu yang berpotensi mencegah, atau bahkan menghambat secara aktif, suatu tindakan dianggap sebagai faktor penghambat. Minimnya alokasi dana yang memadai untuk penyelenggaraan pelatihan/BIMTEK merupakan salah satu tantangan yang paling sering dihadapi. Biaya perjalanan dinas karyawan, termasuk gas, makanan, dan penginapan, berkontribusi pada hal ini. Para peneliti merekomendasikan untuk memverifikasi jumlah uang yang dihabiskan dan yang diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan proyek dengan benar. Pertemuan dengan pegawai untuk membahas dana anggaran, dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dan harapan dari staf Inspektorat atas pemotongan dana anggaran untuk menutupi kekurangan anggaran BIMTEK.

#### **b. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program**

Faktor pendukung adalah sesuatu yang membantu, mengajak, atau diharapkan membantu hal lain. Visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh pengawasan dan pembinaan Kepala Inspektorat dan koordinasi yang baik antara Kepala Inspektorat dengan pegawai terkait, membuat kebijakan dan program kegiatan lebih tepat sasaran dan mencegah penyimpangan kegiatan. Supervisi, pembinaan, dan koordinasi yang efektif akan berdampak signifikan terhadap konsentrasi dan penghindaran penyimpangan dari arah kebijakan dan kegiatan program yang dimaksud.

## **3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penggunaan SIMTLHP**

### **3.2.1 Faktor Pendukung**

Dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) di Inspektorat Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah diketahui terdapat 2 (dua) faktor yang mendukung jalannya Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



diantaranya sebagai berikut:

**a. Pengawasan dan Pembinaan yang baik**

Pengawasan dan pembinaan terhadap kerja pegawai dilakukan dengan baik dan terarah sesuai dengan kebijakan serta tugas pokok yang berlaku di setiap bidang. Faktor pendukung internal pengawasan dan pembinaan ini dilakukan agar visi dan misi kepala daerah dan rancangan awal yang sudah ada dapat terarah, kemudian untuk menghindari terjadinya penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai. Tujuan utama pengawasan dan pembinaan Kepala Inspektorat adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

**b. Aktifnya Peranan Kepala Inspektorat dengan Pegawai Inspektorat**

Aktifnya peranan Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan menjadi salah satu faktor pendukung pula, Kepala Inspektorat dinilai selalu mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi keputusan pada saat rapat karena setiap kali proses pengambilan keputusan selalu mengedepankan musyawarah bersama. Pengawasan, pembinaan, dan koordinasi yang baik memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap realisasi visi dan misi Kepala Daerah, sehingga kebijakan dan program kegiatan lebih tepat sasaran dan tidak menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan.

**3.2.2. Faktor Penghambat**

Inspektorat Kabupaten Katingan selalu berupaya memberikan hasil kinerja yang baik demi mewujudkan sinkronisasi visi dan misi Kepala Daerah. Namun dalam setiap melaksanakan tugas, tentunya terdapat beberapa faktor yang bisa menghambat kinerja dari Inspektorat Kabupaten Katingan. Faktor penghambat tersebut antara lain kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia serta anggaran untuk pelaksanaan pelatihan/BIMTEK yang mana digunakannya aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP).

**a. Anggaran Pelatihan/BIMTEK**

Pelaksanaan pelatihan/BIMTEK sangatlah penting dalam meningkatkan skill serta pengetahuan dari para pegawai untuk mewujudkan kinerja Inspektorat yang sesuai dengan harapan pimpinan serta masyarakat Kabupaten Katingan. Ketiadaan dana merupakan masalah umum dalam penyelenggaraan pelatihan/BIMTEK, yang mengakibatkan penyelenggaraan pelatihan tidak berjalan lancar. Kekurangan dana untuk melaksanakan pelatihan BIMTEK dengan baik merupakan masalah yang umum. Hal ini disebabkan perjalanan dinas pegawai yang dilakukan oleh pegawai memerlukan biaya yang cukup besar, seperti transportasi, penginapan, dan makan. Para peneliti merekomendasikan untuk memverifikasi jumlah uang yang dihabiskan dan yang diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan proyek dengan benar.

**b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan sebuah kinerja organisasi. Dalam menyinkronkan visi dan misi pembangunan dengan kegiatan yang akan dilakukan, meskipun memiliki SDM yang baik dari segi kualitas, namun kuantitasnya tidak mencukupi maka pekerjaan akan sulit untuk diselesaikan. Hal tersebutlah yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Katingan dimana jumlah SDM yang ada belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Pegawai Inspektorat Kabupaten Katingan memiliki tingkat pendidikan yang baik dimana sebagian besar adalah lulusan sarjana. Tetapi melihat dari sisi kuantitas masih kurang.

**c. Kualitas Server yang kurang memadai**

Server merupakan perangkat yang harus beroperasi secara terus menerus untuk memastikan sebuah website selalu dapat diakses oleh pengguna. Namun, ada kalanya masalah server memerlukan pemadaman sementara. Ini mungkin karena kualitas server di bawah standar, teknologi usang, atau perawatan yang ceroboh. Inspektorat masih kekurangan jumlah pegawai yang dibutuhkan, terutama dalam hal pemenuhan sumber daya manusia dalam perencanaan proyek-proyek yang akan datang. Sesuai dengan rekomendasi peneliti, sebaiknya Inspektorat mengadakan pertemuan dengan

pegawainya untuk membahas dana anggaran yang akan dipotong untuk menutupi kekurangan anggaran BIMTEK, dengan tujuan mendapatkan persetujuan pegawai dan harapannya ke depan.

### **3.3 Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Faktor Penghambat**

Mewujudkan tujuan dari efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan. Dalam penerapannya di lapangan masih terdapat permasalahan dan hambatan yang harus diatasi. Sebagai wujud tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah melakukan upaya, sebagai berikut :

#### **3.3.1 Pemenuhan Anggaran**

Anggaran merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan kinerja suatu organisasi sehingga apabila terjadi kekurangan anggaran yang harus dilakukan yaitu memenuhi anggaran yang kurang tersebut. APBD tahun anggaran mendatang akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan anggaran pelatihan dan BIMTEK dengan mengambil dari anggaran kegiatan yang ada. Sesuai dengan rekomendasi peneliti, sebaiknya Inspektorat mengadakan pertemuan dengan pegawainya untuk membahas dana anggaran yang akan dipotong untuk menutupi kekurangan anggaran BIMTEK, dengan tujuan mendapatkan persetujuan pegawai dan harapannya ke depan.

#### **3.3.2 Penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja suatu organisasi baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia bisa menurunkan tingkat kualitas kinerja suatu organisasi sehingga diperlukan tindakan untuk mengatasi masalah kekurangan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk penambahan jumlah Sumber Daya Manusia di bagian Admin pengelola Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tersebut yaitu melalui melakukan evaluasi untuk mengetahui berapa jumlah yang dibutuhkan agar bisa menjadi bahan untuk pembentukan formasi baru pada tahun berikutnya.

Inspektorat berusaha mengatasi faktor-faktor yang membatasi kapasitas sumber daya manusianya dengan melakukan evaluasi, meningkatkan kualitas stafnya melalui kerja sama dengan pemerintah federal, dan menginformasikan kepada pemerintah provinsi tentang masalah yang muncul sebagai akibatnya.

#### **3.3.3 Menjalin Kerjasama dengan Toko Modern Pembelajaran Mandiri**

Dalam penyelenggaraan proses pemerintahan khususnya bidang keuangan tentunya terdapat peraturan dan sistem yang harus diikuti oleh seluruh organisasi pemerintah daerah yang ada. Sebelum menyesuaikan dengan sistem yang ada, tentunya harus dilaksanakan pengenalan maupun pelatihan terkait dengan sistem yang akan digunakan. Namun apabila pelaksanaan pelatihan tidak didukung dengan anggaran yang cukup, maka yang bisa dilakukan hanyalah pembelajaran secara otodidak mandiri.

Pembelajaran secara mandiri bagi seluruh pegawai Inspektorat terkait dengan sistem dan peraturan terbaru sehingga meskipun tidak ada anggaran untuk pelaksanaan pelatihan/BIMTEK namun pegawai Inspektorat bisa memahami sistem dari Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) tersebut.

Upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang bersifat tidak langsung yaitu dengan menyusun dan menyediakan materi-materi mengenai penggunaan sistem yang baru untuk dibagikan kepada seluruh pegawai agar bisa dipelajari secara mandiri. Adapun saran dari peneliti yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan materi harus menyusun dengan sebaik mungkin sehingga mudah untuk dipahami pegawai.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) di Inspektorat Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan sistem operasional prosedur yang berlaku sebagai bentuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan dalam melakukan pengawasan tindak lanjut pemeriksaan berbasis elektronik.

### 3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa selain kendala terbatasnya jumlah sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan juga Minimnya alokasi dana yang memadai untuk penyelenggaraan pelatihan/BIMTEK merupakan salah satu tantangan yang paling sering dihadapi. Biaya perjalanan dinas karyawan, termasuk gas, makanan, dan penginapan, berkontribusi pada hal ini. Para peneliti merekomendasikan untuk memverifikasi jumlah uang yang dihabiskan dan yang diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan proyek dengan benar.

## IV. KESIMPULAN

Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) berdasarkan analisis menggunakan teori Duncan dalam Steers yang meneliti dengan 3 (tiga) dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Berdasarkan keriga dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat sudah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) dengan baik, namun terdapat faktor pendukung dan juga penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukungnya yaitu: adanya pengawasan dan pembinaan yang baik, serta aktifnya peranan dari kepala Inspektorat dan para pegawai. Faktor penghambatnya yaitu terletak pada sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran.

Upaya mengatasi hambatan dalam efektivitas penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP), yaitu: melakukan pemenuhan anggaran; Penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan melakukan pembelajaran secara mandiri.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akbar, Bahrullah. 2015. *Sistem Pengawasan Keuangan Negara Di Indonesia*. Pusat Kajian Keuangan Negara
- Basuki, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. KreasiWacana.
- Berg, Bruce L. 2001. *Qualitative Research Method For The Social Sciences By Allyn & Bacon Apearson Education Company*. NeedHan Heights
- Creswell, Jhon W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design*. America: Sage Publication.

- Darise, Nurlan, 2006. *Pengelola Keuangan Daerah*. Jakarta. IndeksKelompok Gramedia.
- Kosasih, A. 2007, *Optimalisasi Media Pembelajaran*. Jakarta : PT.Grasindo.
- Kumar, Ranjit. 2005. *Research Methodology: Methods and Theniques*. New Delhi: New age International
- Marbun. 1994. DPRD Pertumbuhan, *Masalah dan Masa Depan*nya (edisirevisi). Jakarta. Erlangga.
- Nawawi, Hadari, 1989. *Aspek-aspek Pengawasan*. Yogyakarta. GajahMada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2013. *KYBERNOLOGI (Ilmu Pemerintah Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rinusu dan Sri Mastuti. 2006. *Panduan Praktis Mengontrol APBD*. Jakarta. Civil Education and Budget Transparaency Advocation(Ciba).
- Sagala, Syaiful. 2010. *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung. Alfabeta
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta. Rajawali.
- Sirajuddin. Dkk. 2009. *Parlemen Lokal. Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah*. Malang. SATARA Press
- Soleh, Chobib dan Heru, Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung, Fokus Media.

#### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Peraturan Bupati Kabupaten Katingan No. 57 Tahun 2016 Tentang Efektivitas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Melalui Teknologi Informasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang PedomanPelaksanaan Reviu Inspektorat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

#### **C. Jurnal**

- Dilson. 2016. Sistem Informasi Pengawasan Internal Inspektorat Berbasis Client Server. *Jurnal Penelitian*
- Tanti Susanti. 2011. Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) (Studi Kasus Di Inspektorat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)). *Jurnal Penelitian*.